



## Rawan Korupsi

**AKTIVIS** Gemawan Kalbar Muhaimin menyatakan, wacana BPK akan mengaudit anggaran pilkada merupakan langkah yang baik bagi lembaga tersebut. Supaya dana itu tidak disalahgunakan.

"Pemerintah telah menanggarkan dana pilkada, melewati proses dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Barulah dana itu dikucurkan ke lembaga yang menggunakannya. Maka sangat perlu dilakukan pengawasan bagi BPK sendiri. Demi terhindar dari tindakan korupsi, dalam menggunakan anggaran tersebut," ujar Muhaimin kepada *Tribun*, Sabtu (13/6).

Menurutnya, terseleenggaranya pilkada secara serentak se-Indonesia sangat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran pilkada. Sehingga perlu pengawasan semua pihak, baik BPK, ke-

polisian, KPK, masyarakat, dan lembaga lainnya.

"Kalau sama-sama mengawasinya, kerawanan penyalahgunaan anggaran pilkada bisa terpantau oleh semua pihak. Karena kita tidak tahu, bagaimana proses penganggarannya dari pemerintah dan pengguna anggaran itu," ucapnya.

Dengan ini Muhaimin berharap, dana pilkada bisa digunakan sesuai dengan peruntutannya. Begitu juga dengan pemerintah di daerah yang mengucurkan anggaran tersebut supaya menggambarkan sesuai dengan kebutuhan pilkada.

"Kita harap pilkada di Kalbar bisa berjalan dengan baik. Serta tidak ada indikasi penyalahgunaan dana Pilkada. Maka perlu peran semua pihak, dalam mengawasi proses penganggaran dan penggunaan dana itu," ungkapnya. **(rul)**